



WRI INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lokakarya

Percepatan Aksi Restorasi Hutan dan Bentang Lahan di Indonesia: Tantangan dan Kesempatan untuk Meningkatkan Ketahanan Ekologi dan Penghidupan Masyarakat

Jakarta, 19-20 April 2016

Lokakarya restorasi yang dihadiri pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga riset, dan perwakilan sektor swasta ini diadakan untuk: 1) mendiskusikan hikmah ajar dari berbagai kegiatan restorasi yang pernah dilakukan selama ini sehingga kita bisa mempercepat upaya Restorasi Hutan dan Bentang Lahan (atau disebut juga sebagai RENTANG), sekaligus juga 2) memperkenalkan Metode Evaluasi Kesempatan Restorasi (MEKAR). WRI Indonesia dan IUCN mendefinisikan RENTANG sebagai sebuah proses panjang untuk meningkatkan fungsi ekologi sekaligus penghidupan masyarakat di hutan dan bentang lahan terdeforestasi atau terdegradasi. RENTANG juga merupakan sebuah definisi yang inklusif karena mencakup berbagai jenis upaya restorasi, mulai dari reklamasi lahan bekas tambang hingga regenerasi alami. Adapun MEKAR merupakan sebuah kerangka kerja yang fleksibel, terjangkau, dan inklusif untuk mengidentifikasi kesempatan restorasi, termasuk intervensi restorasi yang tepat, di suatu lanskap.

Hari ke-1

Pembukaan

Perwakilan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Badan Restorasi Gambut (BRG) yang memberikan sambutan di hari pertama memaparkan bahwa RENTANG perlu dilakukan karena terjadi pengurangan luasan hutan dan penurunan kualitas lingkungan hidup dalam skala besar di Indonesia. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut, mengeluarkan lebih dari 2 GtCO₂e pada tahun 2015. Kini, 27% dari luasan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia tergolong kritis. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait restorasi telah dilakukan pemerintah, mulai dari upaya rehabilitasi DAS kritis hingga restorasi gambut dengan target sebesar 2 juta hektar sebelum tahun 2020. Kedua perwakilan pemerintah berharap komitmen terhadap RENTANG oleh semua pihak akan semakin tinggi. Dalam lokakarya ini, BRG juga mengungkapkan kontribusi komitmen untuk Bonn Challenge sebesar 330 ribu hektar. Luasan ini merupakan luas lahan gambut terdegradasi di dalam kawasan konservasi yang akan direstorasi BRG. Komitmen ini menjadi komitmen pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk Bonn Challenge, sebuah gerakan global yang bertujuan untuk merestorasi 350 juta hektar lahan terdegradasi sebelum 2030.

Diskusi Pleno

Dalam diskusi pleno di hari pertama, pembicara dari WRI, CIFOR, dan ICRAF menekankan pentingnya penyelesaian berbagai tantangan RENTANG di Indonesia. Survei informal yang dilakukan oleh WRI terhadap peserta lokakarya menyebutkan bahwa tantangan utama RENTANG adalah belum jelasnya tata ruang atau tata kelola dan kepemilikan hutan dan lahan serta masih kurangnya pemahaman akan berbagai manfaat dan fungsi hutan serta pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Pembicara dari CIFOR menekankan pentingnya sains tidak hanya dalam upaya mengukur kehilangan hutan dan lahan, terutama dari lahan basah seperti mangrove dan gambut, dan emisi gas rumah kaca yang ditimbulkannya, tetapi juga pentingnya sains dalam upaya restorasi. Akan tetapi, dimensi sosial serta aspek manusia dari restorasi tersebut juga tidak boleh terlupakan. Pembicara dari ICRAF secara spesifik memberikan contoh berbagai proyek restorasi ICRAF di tiga daerah berbeda yang menekankan pada perbaikan penghidupan masyarakat secara ekonomi. Namun, mengingat ketiga daerah tersebut memiliki ancaman dan tingkatan degradasi serta deforestasi yang berbeda, pendekatan restorasi yang dilakukan, baik dari segi teknis maupun sosial, juga berbeda. Aspek sosial, politik, dan ekonomi restorasi, terutama pendanaan sesudah suatu proyek berakhir, harus dipikirkan bersama.

MEKAR hadir sebagai sebuah perangkat yang memungkinkan para pemangku kepentingan duduk bersama dan mendiskusikan berbagai persoalan multi-aspek yang selama ini menjadi penghambat upaya restorasi. Di dalam MEKAR terdapat analisis geospasial, ekonomi dan finansial, karbon, serta sosial-politik. Dalam sesi kelompok hari pertama, para peserta berotasi dari satu sesi aspek MEKAR ke sesi lainnya.

Sesi *Breakout*: Analisis Geospasial

Pada sesi analisis geospasial, dibahas berbagai contoh pemetaan kesempatan restorasi yang dilakukan oleh berbagai negara, seperti Kenya, Etiopia, dan Malawi. Pemetaan kesempatan restorasi diawali dengan upaya identifikasi tantangan serta kriteria RENTANG secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan, selain juga pengumpulan berbagai data spasial dan penghitungan statistik area kesempatan restorasi. Dengan menggunakan contoh peta kesempatan restorasi dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibuat WRI dan ICRAF, peserta lokakarya membahas bagaimana sebaiknya analisis geospasial untuk restorasi di Indonesia dilakukan, misalnya dengan menekankan pada sumber data yang tepat dan disetujui bersama serta pentingnya pengetahuan lokal.

Sesi *Breakout*: Diagnosis Faktor Kunci Pendukung Restorasi

Dalam sesi diagnosis faktor kunci pendukung restorasi, dibahas sebuah perangkat dalam MEKAR yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan cepat dan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor pendorong, pemungkinan, dan pelaksanaan RENTANG. Perangkat tersebut menggunakan sistem 'lampu lalu lintas' dengan skema tiga pilihan jawaban untuk memudahkan para pemangku kepentingan. Peneliti CIFOR juga mempresentasikan hasil diagnosis faktor kunci restorasi di Dompas, Bengkalis, Riau, dan menemukan bahwa perangkat tersebut cukup komprehensif tetapi juga fleksibel untuk disesuaikan di lanskap yang berbeda-beda.

Sesi *Breakout*: Valuasi Ekonomi

Sesi mengenai valuasi ekonomi yang dipandu bersama oleh perwakilan WRI dan CSF mendiskusikan pentingnya analisis biaya-manfaat dalam perencanaan restorasi, termasuk di dalamnya penghitungan stok karbon yang dapat disekuester dan imbal jasa lingkungan. Dibahas pula penggunaan valuasi berbasis pasar dan non-pasar serta pentingnya menyelaraskan sektor hulu dan hilir dalam pemantapan target restorasi serta pasar bagi produk restorasi. Beberapa studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur juga dibahas dalam sesi tersebut.

Sesi *Breakout*: Analisis Keuangan dan Pendanaan Restorasi

Sesi analisa keuangan dan pendanaan restorasi dengan narasumber utama dari IUCN dan Conservation Strategy Fund (CSF) juga membahas studi kasus dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari dalam negeri, disebutkan beberapa model seperti kegiatan konservasi yang bersifat *for-profit*, restorasi berbasis konsesi, serta pembayaran imbal jasa lingkungan. Kebanyakan pendanaan kegiatan restorasi atau kebijakan terkait sekarang mengandalkan donor, tetapi pemateri dan peserta lokakarya menyebutkan berbagai potensi pembiayaan publik dan swasta yang hingga saat ini belum banyak dimanfaatkan atau pemanfaatannya terkendala peraturan yang tumpang tindih dan insentif yang kurang.

Hari ke-2

Diskusi Pleno

Lokakarya di hari kedua diawali dengan sesi pleno dengan pemateri dari CIFOR, KLHK, dan ICRAF yang mencoba menjabarkan tantangan bagi pengelolaan hutan berbasis lanskap, terutama untuk melakukan RENTANG, serta juga memulai diskusi mengenai penerapan MEKAR dalam konteks Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antar sektor dan program, baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal, RENTANG membutuhkan koordinasi lintas-sektor, lintas-program, dan lintas-yuridiksi yang kuat. Disebutkan pula bahwa pendekatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bentuk pengelolaan berbasis lanskap memang sudah diatur dalam kebijakan pemerintah dan menjadi salah satu acuan pengelolaan hutan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan pada tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi ujung tombak manajemen perhutanan, sehingga pelibatan KPH menjadi sangat penting dalam upaya restorasi. Terakhir, dipaparkan pula inisiatif penerapan RENTANG oleh WRI dan ICRAF yang dilakukan di DAS Musi (Sumsel) dan DAS Batanghari (Jambi).

Sesi *Breakout*: Restorasi melalui Perhutanan Sosial

Sesudah sesi pleno, peserta lokakarya dipersilakan memilih salah satu sesi mengenai penerapan MEKAR dalam restorasi ekosistem atau sektor prioritas, seperti perhutanan sosial, lahan basah, dan restorasi yang dilakukan pihak swasta. Dari sesi perhutanan sosial, disepakati bahwa potensi restorasi dari area alokasi perhutanan sosial sebesar 12.7 juta hektar sangat besar dan kerangka MEKAR dapat membantu upaya menciptakan tata kelola perhutanan sosial yang efektif dan efisien baik pada tingkat lanskap maupun tingkat tapak. Dalam diskusi disebutkan juga bahwa berbagai spesies bambu memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan lebih jauh lewat skema perhutanan sosial.

Sesi *Breakout*: Restorasi di Lahan Basah

Dari sesi mengenai lahan basah, termasuk gambut dan mangrove, disepakati bahwa suksesnya upaya restorasi lahan basah sangat bergantung pada aksi yang dilakukan di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik di suatu daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengetahuan lokal yang mereka miliki serta pemilihan area restorasi secara teknis menjadi faktor penting penentu kesuksesan restorasi lahan gambut dan mangrove, yang tingkat kesulitannya seringkali lebih tinggi dibandingkan restorasi pada tipe ekosistem lainnya. Oleh karena itu, BRG perlu didukung segala pihak dalam pelaksanaan berbagai komponen restorasi gambut, mulai dari *re-wetting*, revegetasi, pencegahan kebakaran. Dalam penerapan MEKAR untuk restorasi lahan gambut, ketersediaan dan integrasi data biofisik dan sosial ekonomi harus mendapat perhatian lebih.

Sesi *Breakout*: Restorasi Pihak Swasta

Terakhir, dalam sesi mengenai restorasi yang dilakukan sektor swasta, narasumber dari APRIL, APP serta FFI menyediakan banyak masukan mengenai restorasi sektor swasta. Beberapa analisis yang termasuk dalam komponen MEKAR telah dilakukan APRIL dan APP, seperti pemetaan geospasial. Restorasi pihak swasta di Indonesia sebagian besar dilakukan lewat mekanisme Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) selama 60 tahun. Meskipun valuasi ekonomi/analisa biaya manfaat belum dilakukan oleh pihak APRIL dan APP, tetapi ada rencana untuk melakukannya dalam waktu dekat. Model bisnis dan opsi pembiayaan berkelanjutan untuk IUPHHK-RE di bawah APRIL dan APP juga telah disusun, tetapi supaya dapat menghasilkan keuntungan bersih tampaknya butuh waktu lama dan dukungan pemerintah lewat penyediaan insentif keringanan pajak atau opsi inovatif lainnya.

Penutupan

Sebelum lokakarya ditutup, WRI dan Conservation International (CI) memaparkan perlunya sebuah peta jalan atau rencana aksi guna mempercepat aksi RENTANG di Indonesia. Supaya sukses, RENTANG harus luwes dan sebaiknya bersifat gerakan, meskipun tentunya tetap harus memiliki target kualitatif dan kuantitatif serta mekanisme yang jelas. Untuk mengoordinasikan gerakan ini, sebuah forum multipihak yang meliputi para pemain kunci restorasi sangat diperlukan. WRI dan IUCN akan mengupayakan pendirian forum multipihak ini dalam waktu dekat. Forum multipihak ini akan memetakan kondisi dan arah gerak RENTANG, membantu pemerintah pusat dan daerah menjalankan strategi RENTANG, mensinergikan kegiatan RENTANG, serta meningkatkan profil RENTANG serta MEKAR di hadapan masyarakat dan pihak swasta. Diharapkan sebelum akhir tahun ini forum multipihak RENTANG tersebut sudah akan terbentuk.